

PERTAHANAN– PENGESAHAN KERJASAMA

2017

UU NO. 14, LN.2017/NO.232, TLN NO.6137

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA MERDEKA PAPUA NUGINI TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINDA CONCERIfTTG COOPERATION ACTMITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)

ABSTRAK	: - untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini telah ditandatangani Persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka papua Nugini tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent state of Papua New Guinea concerning cooperation Activities in the Field of Defence), pada tanggal 72 Maret 2010 di Port Moresby, papua Nugini dan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pengesahan Perjanjian Internasional berkenaan dengan pertahanan dilakukan dengan undang-undang, maka perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of papua New Guinea concerning Cooperation Activities in the Field of Defence) . - Dasar hukum dari Undang-Undang ini : UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 30 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (5); UU No. 24 Tahun 2000. - Dalam Undang-Undang diatur tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang kegiatan kerjasama di bidang pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of papua New Guinea concerning Cooperation Activities in the Field of Defence) yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
CATATAN	1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2017.